



Perkembangan Kawasan-kawasan Perkotaan Kecil di Kabupaten Wonogiri dan Potensi Perannya dalam Penguatan Keterkaitan Desa-Kota

The Development of Small Urban Areas in Wonogiri Regency and Their Potential Role in Strengthening Rural-Urban Linkages

Okta Bashri Rahma Wati^{1*}, Fadjar Hari Mardiansjah¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

* e-mail: oktabashrirahmawati@gmail.com

(Received: December 19, 2023; Reviewed: July 1, 2024; Accepted: July 19, 2024)

Abstrak

Urbanisasi mendorong perkembangan wilayah perkotaan tidak terbatas pada kawasan metropolitan, tetapi juga mencakup kawasan perkotaan kecil. Indonesia telah mengalami pertumbuhan kawasan perkotaan kecil yang sangat cepat, terutama di wilayah kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa. Pertumbuhan kawasan perkotaan kecil tersebut juga terjadi pada Kawasan Subosukawonosraten, yang terbentuk dari perluasan kawasan perkotaan Kota Surakarta sebagai pusatnya. Sebagai bagian dari Subosukawonosraten, Kabupaten Wonogiri juga mengalami pertumbuhan perkotaan yang berimplikasi pada tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan perkotaan kecil di dalamnya meskipun tidak secepat kabupaten-kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri terbentuk dari aglomerasi desa perkotaan atau desa-desa yang memiliki karakteristik perkotaan. Keberadaan kawasan perkotaan kecil di Wonogiri berpotensi untuk memiliki peranan strategis dalam penguatan keterkaitan desa-kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kawasan-kawasan perkotaan kecil di wilayah Kabupaten Wonogiri dari tahun 1990 hingga 2019 dan menganalisis potensi peningkatan perannya dalam penguatan keterkaitan desa-kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, dibantu dengan metode analisis spasial, *location quotient* dan *network analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri mengalami perkembangan penambahan jumlah kawasan perkotaan kecil. Setiap kecamatan memiliki potensi aktivitas utama, yaitu pertanian, industri, dan pariwisata, sehingga berpotensi lebih banyak berperan dalam meningkatkan nilai tambah, daya saing dan/atau akses pasar dari produk kawasan perdesaan, dan sekitarnya. Peran kawasan-kawasan tersebut dapat diperkuat untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota dengan menyediakan dan/atau menambahkan jumlah fasilitas pengolahan, pemasaran/ transit serta pelayanan umum, termasuk fasilitas pendidikan pelatihan yang dapat meningkatkan transformasi teknologi dan inovasi pada aktivitas ekonomi.

Kata kunci: keterkaitan desa-kota; peran kawasan perkotaan kecil; pertumbuhan kawasan perkotaan; urbanisasi wilayah; Wonogiri

Abstract

The urbanization process has led to the development of urban growth, not only in megacities and metropolitan areas, but also in smaller urban areas. Indonesia has experienced rapid growth in small urban areas, particularly in the regencies of Java. One such region experiencing this growth is Subosukawonosraten in Central Java, which is centered around the city of Surakarta and includes surrounding regencies. Wonogiri Regency, as part of Subosukawonosraten has also seen urban growth and the emergence of small towns that have formed through the merging of rural villages with urban characteristics. Although this growth may not be as rapid as in other regencies directly adjacent to Surakarta City, the small urban areas in Wonogiri have the potential to play a strategic role in strengthening rural-urban linkages. This study aims to analyze the development of these small urban areas in Wonogiri Regency from 1990 to 2019 and assess their potential for increasing their role in strengthening village-urban linkages. The research adopts a qualitative approach with descriptive analysis techniques, supported by spatial analysis methods, *location quotient*, and *network analysis*. The results indicate that small urban areas in Wonogiri Regency have experienced development, as evidenced by the increase in their number during this period. Given that each sub-district has the potential for key activities such as agriculture, industry, and tourism, these developing small urban areas in Wonogiri Regency have the potential to contribute significantly to the added value, competitiveness, and market access of rural and surrounding area's products. In the future, the role of these small urban areas can be strengthened by providing or increasing the number of processing, marketing/transit, and public service facilities, including education and training facilities that can support technological transformation and innovation in the local economy.

Keywords: growth of urban areas; regional urbanization; role of small urban areas; rural-urban linkages; Wonogiri

1. PENDAHULUAN

Dunia sedang mengalami urbanisasi yang begitu cepat dalam beberapa dekade terakhir. Urbanisasi adalah suatu proses perubahan dari kehidupan perdesaan ke perkotaan yang dipengaruhi oleh aspek fisik atau morfologi, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi masyarakat, serta meliputi wilayah beserta masyarakat di dalamnya (Harahap, 2013). Menurut UN Department of Economic and Social Affairs (2019), pada tahun 1950 hanya 30% dari populasi dunia yang tinggal di kawasan perkotaan, sementara pada tahun 2018 proporsi ini meningkat hingga 55%. Asia merupakan kawasan pertumbuhan urbanisasi dengan peningkatan persentase tertinggi di dunia, yaitu dari 31,5% di tahun 1990 menjadi 42,2% pada tahun 2010 (UN HABITAT, 2012). Lebih lanjut, terutama di negara berkembang, kota kecil dan menengah dengan populasi kurang dari 500.000 jiwa merupakan tipe kawasan perkotaan yang mengalami pertumbuhan penduduk paling cepat. Zhou (1991) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa perkembangan kawasan perkotaan di negara berkembang relatif cepat dengan kota-kota kecil umumnya tumbuh lebih cepat daripada kota-kota besar.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022, kawasan perkotaan diklasifikasikan menjadi perkotaan kecil, perkotaan sedang, perkotaan besar, metropolitan, dan megapolitan. Kawasan perkotaan dapat berupa kawasan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten dan/ atau kawasan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung. Dalam konteks penelitian ini kawasan perkotaan kecil yang selanjutnya juga disebut dengan kota kecil merupakan aglomerasi perkotaan dengan jumlah penduduk minimum sesuai syarat, yang menjadi tempat konsentrasi aktivitas non-pertanian, serta memiliki pengaruh terhadap kawasan sekitarnya. Saat ini belum terdapat definisi legal terkait ukuran kawasan perkotaan kecil di Indonesia. Namun, menurut penjelasan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 yang sudah diubah dengan peraturan baru, kawasan perkotaan kecil adalah kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 dan paling banyak 100.000 jiwa. Kawasan perkotaan kecil memiliki dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan perdagangan dengan jangkauan pelayanan kecamatan dan/ atau antar desa dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan paling sedikit kantor kecamatan dan pasar harian. Secara hierarkis, kawasan perkotaan termasuk perkotaan kecil dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan strategis nasional, pusat kegiatan wilayah atau pusat kegiatan lokal.

Menurut karakteristik penduduknya, penduduk di kawasan perkotaan kecil cenderung berkegiatan dalam kegiatan non pertanian yang masih bercampur dengan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Selain itu, kawasan perkotaan kecil cenderung memiliki kegiatan industri hasil produksi pertanian dari perdesaan karena adanya pergeseran pusat kegiatan manufaktur dari kota besar ke kawasan yang lebih dekat kepada sumber bahan bakunya (Davies *et al.*, 2021; Gutu Sakketa, 2023; Wang *et al.*, 2022; Yu *et al.*, 2023). Lokasi yang biasanya berada di antara kawasan perdesaan dan perkotaan yang lebih besar menjadikan kawasan perkotaan kecil memiliki peran penting sebagai perantara di dalam keterkaitan desa-kota, yang ditunjukkan oleh adanya arus atau aliran spasial individu, sumber daya alam, keuangan, barang jasa, serta nilai-nilai sosial dan budaya antara kawasan perdesaan dan perkotaan (Somanje *et al.*, 2020). Beberapa peran kawasan perkotaan kecil dalam keterkaitan desa-kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi kawasan perdesaan (X. Wang *et al.*, 2019; Yu *et al.*, 2023), penyeimbang distribusi penduduk (Najarsadeghi & Dorostkar, 2022; Yu *et al.*, 2023), pusat sosial, budaya dan rekreasi (Lysgård, 2019; Rossetti & Quinn, 2021) serta pusat distribusi dan pemasaran (Yu *et al.*, 2023).

Sama halnya dengan negara berkembang pada umumnya, kawasan perkotaan kecil di Indonesia juga mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini salah satunya dipengaruhi oleh perluasan spasial bentuk perkotaan dan penguatan peran kawasan pinggiran dari daerah kota yang ada (Mardiansjah, 2020). (Mardiansjah *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa kawasan perkotaan kecil di Indonesia berkembang dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kota kecil berstatus administratif (kota otonom) dan non administratif (non otonom) yang berupa kawasan-kawasan perkotaan kecil di kabupaten. Kawasan-kawasan perkotaan kecil di wilayah kabupaten ini terbentuk dan berkembang dari aglomerasi desa-desa perkotaan atau desa-desa yang memiliki karakter perkotaan.

Mardiansjah *et al.*, 2021 menjelaskan bahwa penduduk perkotaan di wilayah kabupaten Indonesia mengalami peningkatan dari 5,9 juta jiwa pada tahun 1971 menjadi 66,1 juta jiwa pada tahun 2010. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk perkotaan di wilayah kabupaten meningkat dari 28,5% menjadi 55,8%. Di saat yang sama, proporsi penduduk perkotaan di daerah-daerah kota menurun dari 71,5% menjadi 44,2%. Sementara itu, Setyono *et al.* (2017) juga menjelaskan bahwa berdasarkan data sensus, kota-kota kecil merupakan kota dengan laju perkembangan penduduk perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota besar. Perkembangan urbanisasi tersebut menunjukkan bahwa kota kecil otonom dan kawasan-kawasan perkotaan kecil non administratif di wilayah kabupaten memiliki peran penting sebagai

ruang hidup bagi penduduk perkotaan di Indonesia (Mardiansjah *et al.*, 2021). Dalam konteks ini, studi urbanisasi termasuk terkait perkembangan kawasan perkotaan kecil di kabupaten menjadi penting dalam upaya peningkatan peran kawasan perkotaan dalam menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik dalam pembangunan berkelanjutan (UN-HABITAT, 2016). Studi perkembangan kawasan-kawasan perkotaan kecil di wilayah kabupaten juga dapat dijadikan bahan untuk melihat keterkaitan desa-kota yang diperlukan dalam pertumbuhan suatu wilayah.

Khususnya di Jawa kawasan perkotaan telah berkembang pesat dan melebar jauh melampaui batas administratif di hampir semua arah dari kota-kota inti (Firman, 2017). Pertumbuhan kawasan perkotaan yang hingga keluar batas administrasi kota tersebut mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan-kawasan perkotaan kecil non otonom di wilayah kabupaten di sekitar kota-kota otonom yang tumbuh dan berkembang tadi. Pertumbuhan seperti ini juga terjadi pada Kawasan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, atau dikenal juga dengan Solo Raya) dengan Kota Surakarta merupakan kota otonom pusat pertumbuhannya. Mardiansjah *et al.* (2018) menjelaskan bahwa intensitas pertumbuhan Kota Surakarta sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan Subosukawonosraten telah meluas ke luar wilayahnya dan terkonsentrasi pada tiga kabupaten yang berbatasan langsung, yaitu Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, dan Karanganyar. Sementara itu, kabupaten-kabupaten lain, seperti Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan Klaten tidak mengalami pertumbuhan perkotaan yang secepat ketiga kabupaten yang berbatasan tersebut. Kabupaten Sragen dan Klaten yang memiliki keberadaan jaringan jalan nasional yang menghubungkannya kepada Kota Surakarta membuat kedua kabupaten ini juga cenderung memiliki pertumbuhan perkotaan yang lebih cepat dibandingkan Kabupaten Wonogiri yang berlokasi paling jauh.

Tingkat urbanisasi Kabupaten Wonogiri yang lebih rendah ditunjukkan dengan jauh lebih sedikitnya jumlah kawasan perkotaan dan penduduk perkotaan jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di dalam konstelasi Subosukawonosraten (Mardiansjah *et al.* 2018; Mardiansjah *et al.*, 2021). Kondisi ini membuat pola urbanisasi di Wonogiri berbeda dengan yang terjadi di kabupaten lain. Kawasan-kawasan perkotaan kecil yang tumbuh dan berkembang di Wonogiri merupakan kawasan perkotaan kecil yang berlokasi pada kawasan pertanian perdesaan yang luas. Perkembangan aktivitas perkotaan di Kabupaten Wonogiri terjadi pada kawasan-kawasan perkotaan kecil tersebut yang juga ditetapkan sebagai pusat pelayanan kabupaten dan kecamatan di dalam RTRW. Sebagai dampaknya, kawasan-kawasan perkotaan kecil yang terdiri dari aglomerasi desa-desa perkotaan tersebut mungkin terus meluas dan mendorong perkembangan desa perdesaan menjadi desa perkotaan bagi desa-desa di sekitarnya.

Secara keseluruhan, Kabupaten Wonogiri masih didominasi oleh aktivitas perdesaan yang ditunjukkan dengan distribusi Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) terbesar hingga tahun 2023 berupa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, sektor industri pengolahan juga terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan distribusi terhadap PDRB terbesar kedua dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai kegiatan ekonomi utama bagi sebagian besar penduduk, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan perlu untuk terus didorong agar berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Peran kawasan-kawasan perkotaan kecil sebagai pusat pelayanan terdekat bagi kawasan perdesaan sangat diperlukan bagi pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Penguatan peran kawasan-kawasan perkotaan kecil tersebut juga berkaitan dengan peran pentingnya dalam penguatan keterkaitan desa-kota, yaitu sebagai lokasi yang menyediakan pelayanan untuk peningkatan produk kawasan perdesaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan kawasan-kawasan perkotaan di Wonogiri, serta menganalisis potensinya dalam meningkatkan atau menguatkan keterkaitan desa-kota. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah "Bagaimana perkembangan kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri dan potensi perannya dalam penguatan keterkaitan desa-kota?." Selain memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap proses urbanisasi wilayah yang terjadi, hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai masukan terhadap pengembangan kebijakan dan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Wonogiri di masa depan.

2. KAJIAN TEORI

2.1 URBANISASI DAN URBANISASI WILAYAH

Urbanisasi secara dinamis dapat dipahami sebagai proses perubahan yang muncul dalam perkembangan permukiman perkotaan. Sementara secara statis, urbanisasi dapat diartikan sebagai keadaan perkembangan kota (Konecka-Szydłowska, 2016). Knox dalam Soetomo (2018) merumuskan proses urbanisasi sebagai proses yang didorong oleh perubahan ekonomi yang kemudian mendorong dan didorong oleh faktor lain, yaitu manusia, sumber daya alam, dan

teknologi. Senada dengan pendapat tersebut, Liang & Yang (2019) berpendapat bahwa urbanisasi terjadi akibat pertumbuhan ekonomi kota, yaitu terus meningkatnya permintaan tenaga kerja di pusat kota yang kemudian mendorong penduduk perdesaan untuk berpindah ke kota.

McGee (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perkembangan meluas kawasan terbangun pusat kota yang ke segala arah hingga keluar batas administratif kota telah mengembangkan kawasan-kawasan dengan campuran kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan pada kawasan pinggiran kota-kota di negara berkembang. Firman (2017) juga menyatakan bahwa banyak kota di Indonesia, khususnya di Jawa, telah berkembang pesat dan meluas jauh melampaui batas administrasinya, dan membentuk kawasan-kawasan perkotaan di kawasan pinggirannya. Mardiansjah & Rahayu (2020) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan di Jawa telah menunjukkan pola spasial yang melebar (*extended metropolitan regions*) sejak periode tahun 1980-an. Perkembangan spasial tersebut ditandai oleh pertumbuhan penduduk perkotaan yang melambat di daerah-daerah kota yang menjadi pusat atau inti, serta pertumbuhan penduduk perkotaan yang meningkat di kabupaten-kabupaten sekitarnya (Firman, 2017). Ginsburg (1991) juga menjelaskan bahwa perkembangan formasi kawasan perkotaan yang meluas ini merupakan karakteristik spasial proses urbanisasi pada kota-kota utama di Asia. Perkembangan tersebut pada akhirnya dapat memperkuat interaksi antara perdesaan dengan pusat kota yang memungkinkan adanya penguatan aktivitas pada pusat-pusat perdesaan di pinggiran yang kemudian mengarah pada penguatan integrasi antara pusat kota dengan kawasan pinggirannya. Ginsburg menyebut proses ini sebagai urbanisasi perdesaan atau *urbanization of the countryside*.

Mardiansjah *et al.* (2021) menjelaskan bahwa sebagai akibat dari urbanisasi wilayah, pembentukan perkotaan di wilayah kabupaten tidak akan mengaglomerasi semua desa menjadi satu kawasan perkotaan tunggal. Wilayah kabupaten yang luas dan cenderung didominasi oleh lahan pertanian membatasi proses reklasifikasi atau perubahan status hanya pada tempat-tempat atau beberapa desa tertentu. Desa-desa yang terurbanisasi atau mengalami reklasifikasi menjadi desa perkotaan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu sejarah desa sebagai pusat pelayanan dan potensi pengembangan desa itu sendiri. Sebagian besar desa yang terklasifikasi awal menjadi desa perkotaan adalah desa yang berfungsi sebagai pusat pelayanan seperti menyediakan layanan komersial, administratif, pendidikan hingga kesehatan. Sementara itu, faktor-faktor lain seperti jarak dengan pusat-pusat perkotaan terdekat, dilalui oleh jalan-jalan regional dan potensi aktivitas ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi potensi perkembangannya. Sebagai hasilnya, daripada bergabung menjadi satu kota tunggal, dalam banyak kasus desa-desa perkotaan di kabupaten membentuk beberapa kawasan perkotaan yang terpisah dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda.

2.2 KAWASAN PERKOTAAN KECIL DAN PERKEMBANGANNYA DALAM URBANISASI WILAYAH

Secara umum, definisi kawasan perkotaan kecil didasarkan pada ukuran populasi dan dimensi suatu kota (Fahmi *et al.*, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022, kawasan perkotaan kecil merupakan salah satu bentuk perkotaan yang ditentukan berdasarkan faktor jumlah penduduk dan dominasi kegiatan fungsi. Saat ini belum terdapat ukuran legal kawasan perkotaan kecil. Namun, dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 yang telah diubah dan dicabut dengan peraturan baru dijelaskan bahwa kawasan perkotaan kecil merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah populasi yang dilayani antara 50.000–100.000 jiwa. Di Indonesia, National Urban Development Study (NUDS, 1985) mendefinisikan kota kecil dengan ukuran populasi 20.000-200.000 jiwa dan kota kecamatan dengan ukuran 3.000-20.000 jiwa. Sementara itu, beberapa penelitian terkait kawasan perkotaan kecil di Indonesia menyebutkan bahwa ukuran kawasan perkotaan kecil adalah 25.000-50.000 jiwa (Landra & Setyono, 2012), 20.000-50.000 jiwa (Prawatya, 2013), <100.000 jiwa (Setyono *et al.*, 2017), dan 15.000-30.000 jiwa (Mardiansjah & Rahayu, 2020).

Dilihat dari karakteristik penduduknya, mata pencaharian penduduk di kawasan perkotaan kecil cenderung ke arah kegiatan non pertanian. Menurut Marjonavis-Uzealac dalam Filipović *et al.* (2016), kawasan perkotaan kecil merupakan aglomerasi perkotaan yang memenuhi syarat minimal jumlah penduduk, telah mengurangi kegiatan primer atau pertanian dalam korps perkotaan dan memiliki pengaruh minimal terhadap lingkungan di sekitarnya. Selain itu, biasanya kawasan perkotaan kecil memiliki kegiatan industri hasil produksi pertanian dari perdesaan karena adanya pergeseran pusat kegiatan manufaktur dari kota besar (Davies *et al.*, 2021; Sakketa, 2023; Wang *et al.*, 2022; Yu *et al.*, 2023).

Firman (2017) menjelaskan bahwa wilayah perkotaan di Indonesia khususnya Jawa telah berkembang pesat dan menyebar jauh melampaui batas administratif di hampir semua arah dari kota-kota inti. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang mencakup hingga luar batas administrasi tersebut menjadikan kawasan perkotaan kecil di Indonesia berkembang dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kota kecil berstatus administratif (otonom) dan non administratif (non

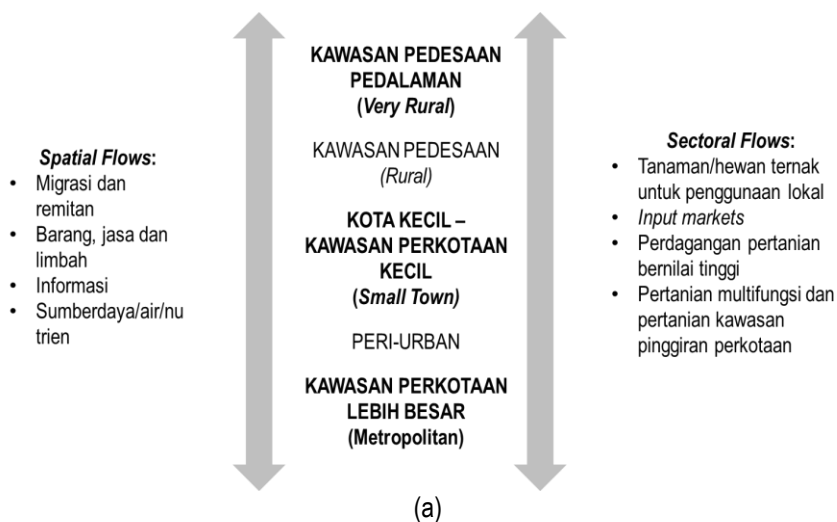
otonom) berupa kawasan-kawasan perkotaan kecil di wilayah kabupaten. Setyono *et al.* (2017) menjelaskan bahwa berdasarkan data sensus, kota-kota kecil merupakan kota dengan laju perkembangan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan kota-kota besar. Mardiansjah (2020) juga menjelaskan bahwa khususnya di Jawa, pembentukan perkotaan yang meluas juga dicirikan pembentukan spasial yang dinamis dan pertumbuhan kawasan-kawasan perkotaan kecil.

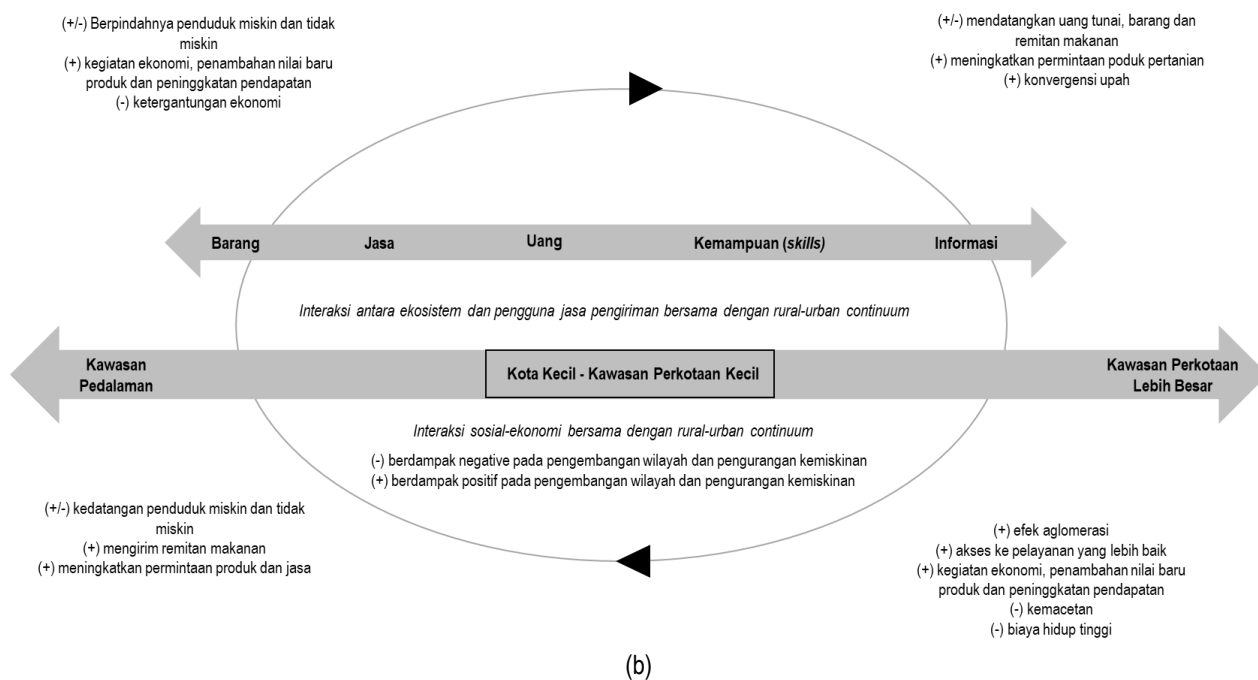
Adapun untuk mengetahui perkembangannya, kawasan-kawasan perkotaan kecil di Kabupaten dapat diidentifikasi dengan mengetahui terlebih dahulu kawasan perkotaan beserta jumlah penduduknya (Mardiansjah *et al.*, 2018; Mardiansjah & Rahayu, 2020). Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan, kawasan perkotaan dalam hal ini diidentifikasi dengan menentukan kawasan yang terbentuk dari aglomerasi atau pengelompokan desa-desa perkotaan yang ada di wilayah kabupaten. Sementara itu, aglomerasi desa-desa perkotaan dapat diketahui dari lokasi desa perkotaan dan batas kecamatannya. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut dapat diketahui kawasan perkotaan yang tumbuh di setiap kecamatan.

2.3 KETERKAITAN DESA-KOTA

Keterkaitan desa-kota memiliki peran potensial dalam meningkatkan daya saing wilayah termasuk di dalamnya untuk mendorong kegiatan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Keterkaitan desa-kota adalah arus atau aliran spasial individu, sumber daya alam, keuangan, barang jasa, serta nilai-nilai sosial dan budaya antara kawasan perdesaan dan perkotaan (Somanje *et al.*, 2020). Keterkaitan desa-kota juga dapat diartikan sebagai aliran spasial dan sektoral manusia, barang, uang, teknologi, pengetahuan, dan informasi antara kawasan perkotaan dan perdesaan (Muhyiddin & Miskiyah, 2017). Rondinelli (1979) menjelaskan keterkaitan desa-kota dalam tujuh tipe aliran, yaitu keterkaitan fisik, ekonomi, mobilitas penduduk, teknologi, interaksi sosial, penyediaan pelayanan, dan politik, administratif, serta organisasional. Sementara itu, menurut Douglass (1998) keterkaitan desa kota dapat dibedakan dalam lima tipe aliran, yaitu orang/penduduk, produksi, komoditas, modal, dan informasi.

Kawasan perkotaan kecil dalam keterkaitan desa kota memiliki peran penting sebagai penghubung antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang lebih besar. Dalam keterkaitan desa-kota, kawasan perkotaan kecil berperan sebagai pusat pelayanan bagi kawasan perdesaan (Wang *et al.*, 2019; Yu *et al.*, 2023). Lokasinya yang berada di antara kawasan perdesaan dan perkotaan yang lebih besar, menjadikan kawasan perkotaan kecil sebagai lokasi dimana fasilitas lebih mudah dijangkau oleh kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan kecil juga berperan sebagai penyeimbang distribusi penduduk (Najarsadeghi & Dorostkar, 2022; Yu *et al.*, 2023), Hal ini utamanya berkaitan dengan strategi pemerintah yang ingin mengurangi migran ke kota-kota besar. Kawasan perkotaan kecil dapat menjadi titik perhentian bagi populasi yang ingin bermigrasi ke kota besar dan metropolis, dan akhirnya berpotensi untuk menjadikan sebagian migran tersebut untuk tinggal permanen. Kawasan perkotaan kecil juga berperan sebagai pusat sosial, budaya dan rekreasi, yaitu titik fokus interaksi sosiokultural antara penduduk perkotaan dengan perdesaan (Lysgård, 2019; Rossetti & Quinn, 2021). Sarana rekreasi atau hiburan di kawasan perkotaan kecil dapat memberikan kesempatan interaksi bagi penduduk perdesaan dan perkotaan. Selain itu, kawasan perkotaan kecil juga berperan sebagai pusat tenaga kerja lokal dan pusat distribusi dan pemasaran (Bole, 2022; Mayer & Lazzeroni, 2022; Yu *et al.*, 2023). Konsep posisi peran kawasan perkotaan kecil dalam keterkaitan desa-kota dapat dilihat pada Gambar 1.





Gambar 1. Peran dan Posisi Kawasan Perkotaan Kecil dalam Keterkaitan Desa-Kota (Tacoli, 1998 dan Wang et al., 2022)

Adapun dalam penelitian ini, peran kawasan perkotaan kecil dalam penguatan keterkaitan desa-kota dianalisis dengan melihat keberadaan fasilitas di kawasan perkotaan kecil kaitannya dalam mendukung aktivitas kawasan pedesaan. Sementara itu, fasilitas atau sarana pelayanan perkotaan juga akan disesuaikan dengan konteks di Indonesia, yaitu dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan.

2.4 SINTESIS LITERATUR

Sintesis literatur merupakan rangkuman dari berbagai sumber literatur yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam sintesis literatur ini diuraikan variabel dan indikator untuk mencapai tujuan penelitian berdasarkan kajian literatur. Sintesis literatur dalam penelitian ini adalah terurai dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Literatur

Sasaran	Substansi	Sumber	Variabel	Indikator
Analisis Perkembangan Kawasan Perkotaan Kecil di Kabupaten Wonogiri	Kawasan perkotaan kecil merupakan aglomerasi perkotaan yang memenuhi syarat minimal jumlah penduduk, telah mengurangi kegiatan primer atau pertanian dalam korps perkotaan dan memiliki pengaruh minimal terhadap lingkungan di sekitarnya. Perkembangan kawasan-kawasan perkotaan kecil di Kabupaten dapat diidentifikasi dengan mengetahui terlebih dahulu kawasan perkotaan dan jumlah penduduknya.	Mardiansjah & Rahayu (2020) dan Mardiansjah (2018)	Status Desa Perkotaan Kependudukan	Klasifikasi desa perkotaan Jumlah penduduk Kepadatan penduduk
Identifikasi Potensi Aktivitas Kawasan Perkotaan Kecil dan Kawasan Perdesaan Sekitarnya	Identifikasi terhadap berbagai potensi yang dimiliki kawasan perkotaan kecil dan kawasan perdesaan dapat dilihat dari potensi pariwisata, potensi perikanan dan kelautan, potensi industri, potensi perdagangan, potensi pertanian dan	Kusuma & Ma'rif (2015); Wijayanti & Ma'rif (2017)	Produksi Komoditas Fasilitas Utama	Aktivitas Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi komoditas • Luas lahan Jumlah dan lokasi: <ul style="list-style-type: none"> • Kios pertanian • Sentra pembibitan • Fasilitas pengolahan

Sasaran	Substansi	Sumber	Variabel	Indikator
Kabupaten Wonogiri	perkebunan, potensi kehutanan, potensi peternakan, potensi pertambangan dan energi, potensi usaha jasa, dan lain-lain	Cahyanti & Anjaningrum (2018); Irmawati <i>et al.</i> (2013); Yu <i>et al.</i> (2023)	Fasilitas Penunjang	Jumlah dan lokasi: <ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitas pendidikan dan menengah ● Lembaga keuangan dan permodalan ● Industri pengolahan Aktivitas Industri
			Industri	Jumlah dan lokasi: <ul style="list-style-type: none"> ● Industri ● Usaha kecil/UMKM
			Fasilitas Penunjang	Jumlah dan lokasi: <ul style="list-style-type: none"> ● Lembaga keuangan ● Sarana pemasaran Aktivitas Pariwisata
			Wisata Fasilitas Penunjang	Jumlah dan lokasi wisata Jumlah dan lokasi sarana perdagangan dan jasa
Analisis Potensi Peningkatan Peran Kawasan Perkotaan Kecil dalam Penguatan Keterkaitan Desa-Kota	Lokasinya yang berada di antara kawasan perdesaan dan perkotaan yang lebih besar menjadikan kawasan perkotaan kecil memiliki peran penting dalam keterkaitan desa-kota. Adapun peran-peran tersebut di antaranya, seperti sebagai pusat pelayanan bagi kawasan perdesaan, pusat sosial budaya dan rekreasi, serta pusat distribusi pemasaran	Ansori & Hastria (2012) Cahyanti & Anjaningrum (2018); Humagi <i>et al.</i> (2021); Irmawati <i>et al.</i> (2013); Kusuma & Ma'rif (2015); Lo <i>et al.</i> (2019); Yu <i>et al.</i> (2023) Wang <i>et al.</i> (2019); Yu <i>et al.</i> (2023), Permendagri No. 57 Tahun 2010	Potensi Sumber Daya Mineral	Lokasi potensi sumber daya mineral
			Fasilitas Penunjang Aktivitas Kawasan Perdesaan	Jumlah dan lokasi: <ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitas penunjang aktivitas pertanian ● Fasilitas penunjang aktivitas industri ● Fasilitas penunjang aktivitas wisata
			Fasilitas Perkotaan	Jumlah dan lokasi fasilitas perkotaan di kawasan perkotaan kecil
			Jaringan Jalan	Jaringan Jalan

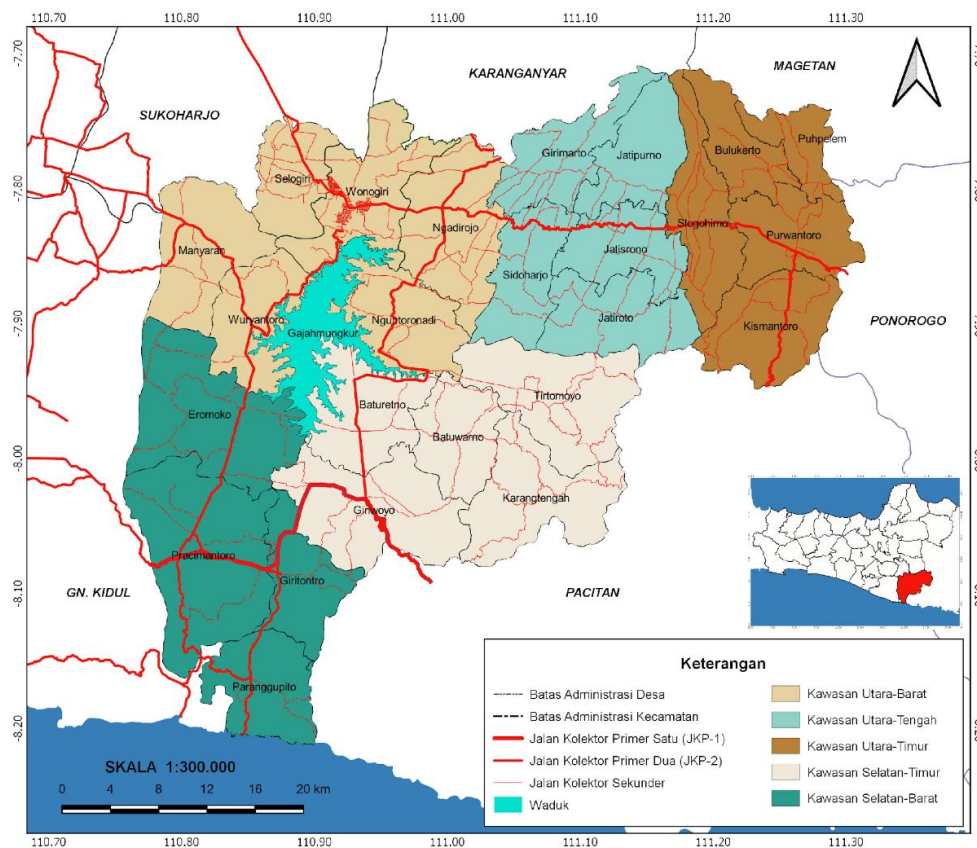
3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Wonogiri, di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 182.236 Ha yang terbagi ke dalam 25 kecamatan, 251 desa, dan 43 kelurahan. Dalam penelitian ini, Kabupaten Wonogiri dikelompokkan menjadi lima kawasan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan yang merupakan penunjang pergerakan aksesibilitas masyarakat, yaitu kawasan utara-barat, selatan-barat, selatan-timur, utara-tengah, utara-timur (Gambar 2).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder yang digunakan berupa data potensi desa tahun 1990, 2000, 2010 dan 2019, data kecamatan dalam angka 2009-2019, data Kabupaten Wonogiri dalam angka 2009-2019, serta dokumen dan laporan milik OPD terkait di Kabupaten Wonogiri tahun 2019. Sementara itu, data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yaitu berkaitan dengan potensi aktivitas kawasan perkotaan kecil dan kawasan perdesaan di sekitarnya.

Secara umum, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan perkembangan kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri dengan melihat pertumbuhan penduduk perkotaan di masing-masing kecamatan. Selain itu, analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan potensi kawasan perkotaan kecil dan kawasan perdesaan di sekitarnya serta potensi peningkatan peran kawasan perkotaan kecil dalam penguatan keterkaitan desa-kota. Dalam prosesnya, terdapat tiga analisis lain yang digunakan, yaitu analisis spasial, analisis *location quotient* (LQ), dan *network analysis*. Analisis spasial digunakan untuk menganalisis dan memahami keterkaitan dan hubungan spasial antara kawasan perkotaan kecil dengan wilayah kecamatan. Analisis LQ digunakan mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di setiap kecamatan seperti pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan. *Network*

analysis digunakan untuk mendukung analisis potensi peningkatan peran kawasan perkotaan kecil dalam penguatan keterkaitan desa-kota dengan melihat sebaran fasilitas dan jangkauan pelayanan sarana serta jaringan jalan yang ada.



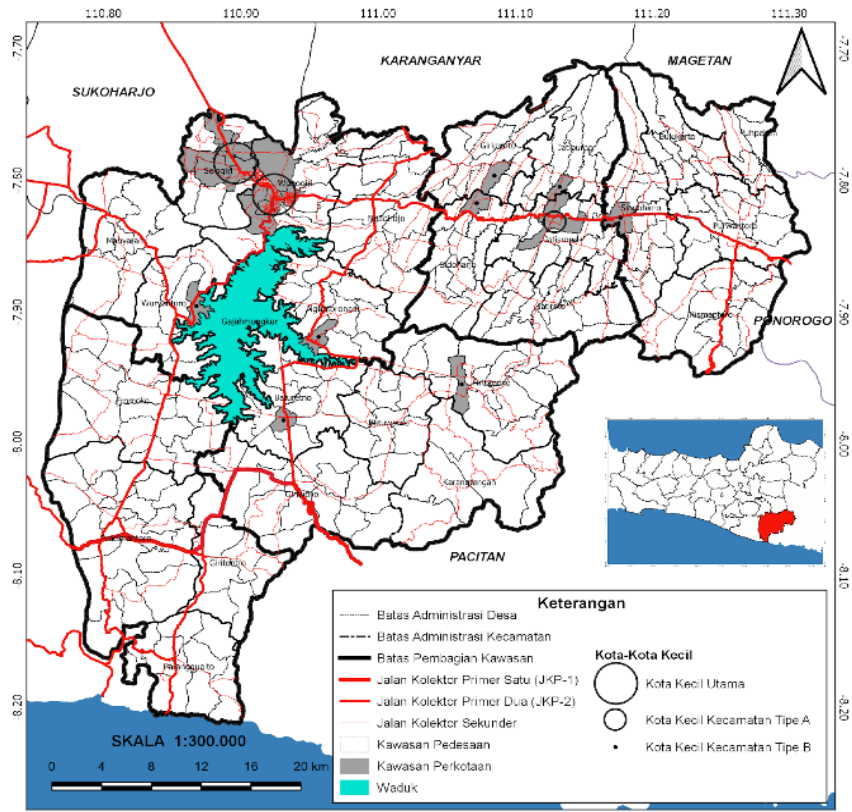
Gambar 2. Peta Pembagian Kawasan Penelitian Kabupaten Wonorejo

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

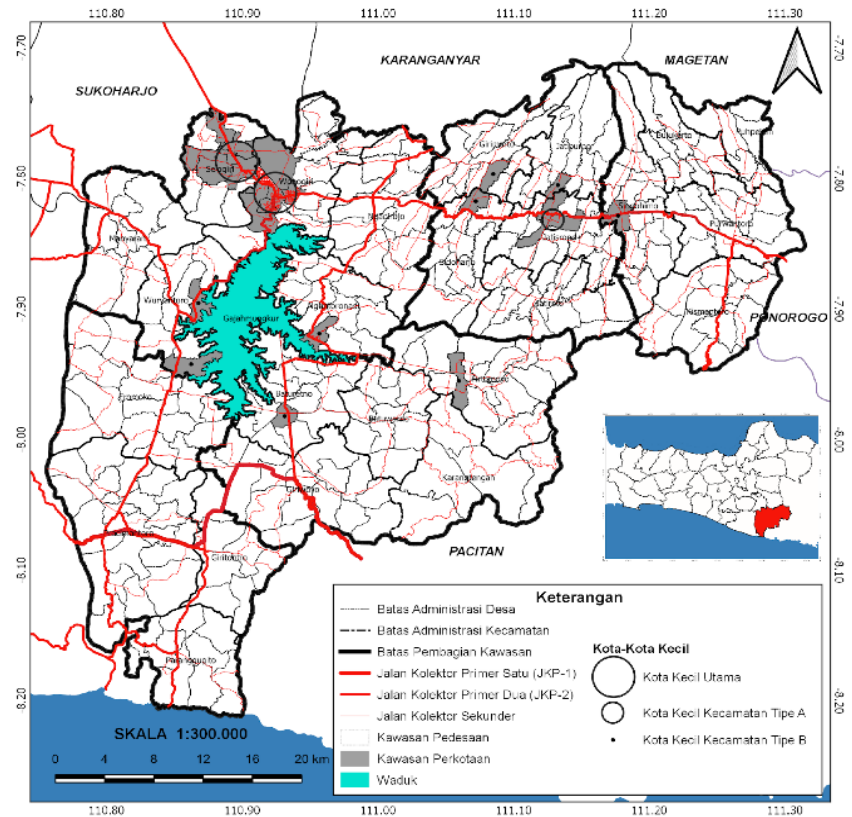
4.1 PERKEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN KECIL

Studi National Urban Development Study (NUDS, 1985) menjelaskan bahwa kota kecil adalah kawasan perkotaan yang memiliki jumlah penduduk 20,000-200,000 jiwa. Sementara itu, belum terdapat definisi legal kebijakan yang secara resmi mengatur tentang batas ukuran jumlah penduduk kawasan perkotaan kecil di Indonesia. Beberapa penelitian mengenai kawasan perkotaan kecil di Indonesia mengklasifikasikan ukuran kawasan perkotaan kecil secara bervariasi. Mardiansjah (2020) mengklasifikasikan kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Tegal menjadi lima ukuran penduduk, yaitu <10,000 jiwa, 10,000-29,999 jiwa, 30,000-49,999 jiwa, 50,000-99,999 jiwa dan 100,000-199,000 jiwa. Dengan memperhatikan jumlah penduduk perkotaan dan tingkat urbanisasi kecamatan serta beberapa literatur, maka penelitian ini mengelompokkan kawasan-kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonorejo menjadi tiga jenis, yaitu kawasan dengan 20,000-50,000 jiwa sebagai Kota Kecamatan Utama (KK-U), kawasan dengan 10,000-20,000 jiwa sebagai Kota Kecamatan tipe A (KK-A) dan kawasan dengan kurang dari 10,000 jiwa sebagai Kota Kecamatan tipe B (KK-B).

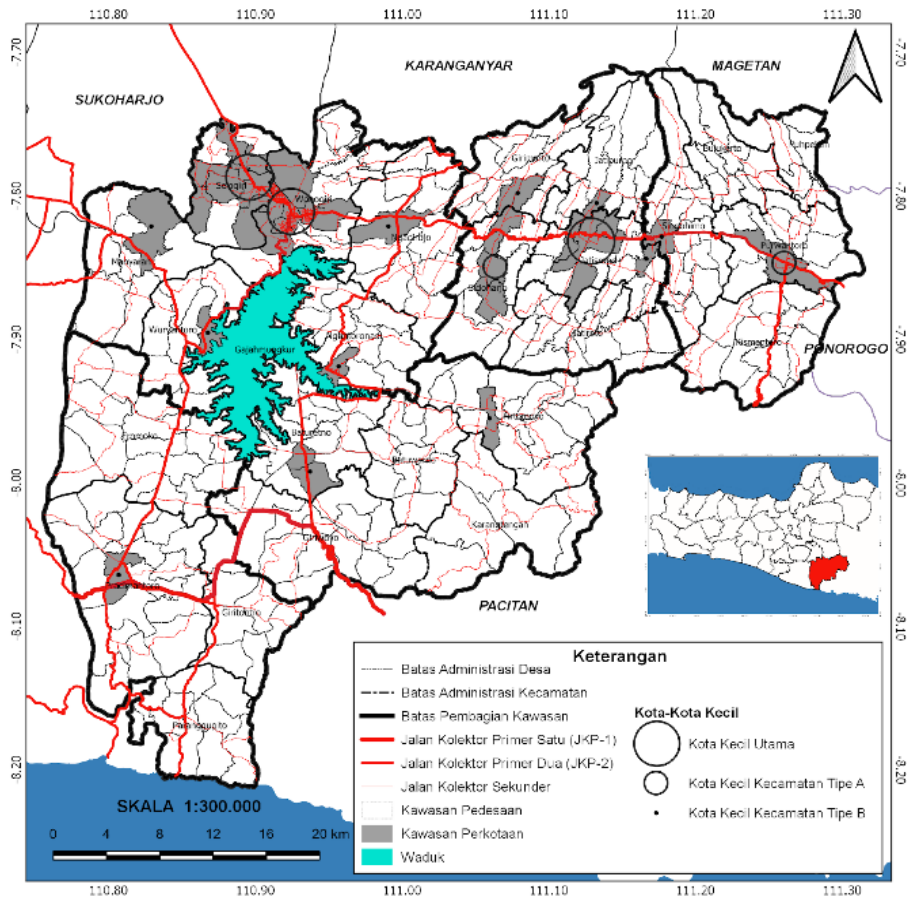
Selama kurun waktu tahun 1990-2019, Kabupaten Wonorejo mengalami penambahan jumlah desa perkotaan sebanyak 20 desa dengan penambahan terbanyak terjadi dalam kurun 2000-2010 (lihat Tabel 2). Kecamatan Purwantoro dan Jatisrono merupakan kecamatan dengan penambahan desa perkotaan paling banyak yaitu masing-masing bertambah sebanyak 4 desa. Secara keseluruhan hingga tahun 2019 Kecamatan Wonorejo dan Selogiri merupakan kecamatan dengan jumlah desa perkotaan terbanyak, yaitu sebanyak 7 dan 8 desa perkotaan. Sementara itu, pada tahun 2019 tingkat urbanisasi di Kabupaten Wonorejo mencapai 20,75%. Kecamatan dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Kabupaten Wonorejo pada tahun tersebut adalah Kecamatan Selogiri sebesar 70,23%, diikuti oleh Kecamatan Wonorejo (60,26%) dan Kecamatan Jatisrono (43,99%).



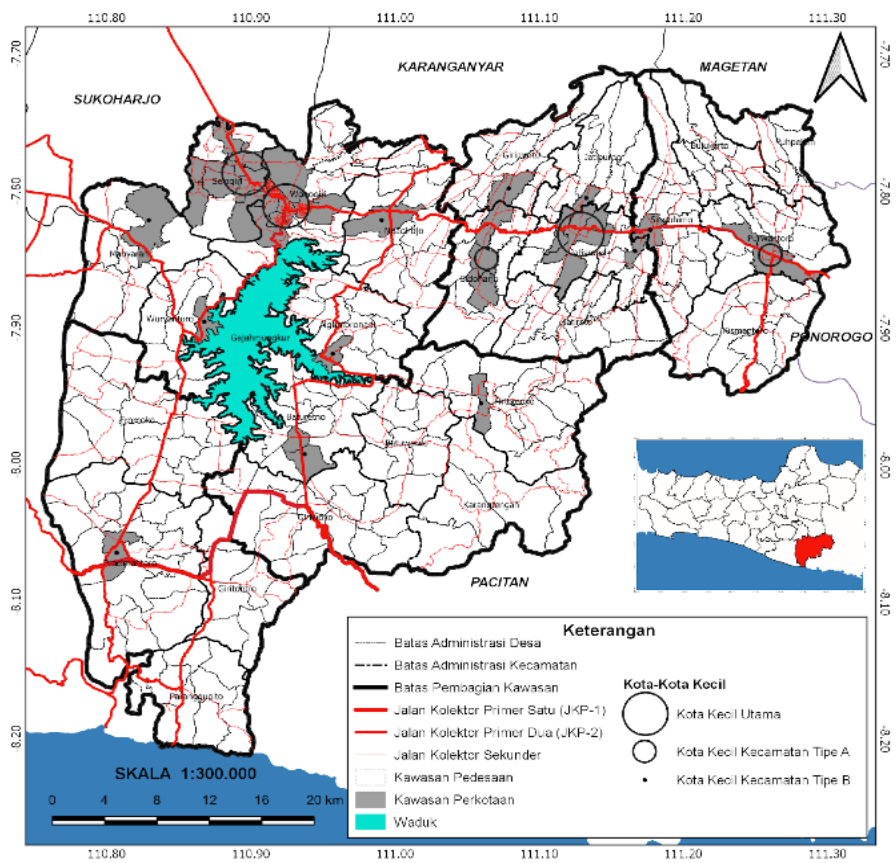
Gambar 3. Perkembangan Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Wonogiri Tahun 1990



Gambar 4. Perkembangan Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Wonogiri Tahun 2000



Gambar 5. Perkembangan Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Wonogiri Tahun 2010



Gambar 6. Perkembangan Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Desa Perkotaan dan Jumlah Penduduk Perkotaan Tahun 1990-2019

Kecamatan	Kawasan Perkotaan	Tipe	1990		2000		2010		2019		Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Per Tahun					
			Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	1990-2000	2000-2010	2010-2019			
Kawasan Utara-Barat																
Kecamatan-Kecamatan dengan Kawasan Perkotaan Kecil Berpenduduk 20,000-50,000 jiwa																
Wonogiri	Giripurwo	KK-U	33,425	5 desa	36,412	5 desa	49,908	7 desa	49,393	7 desa	0.89%	lambat	3.71%	tinggi	-0.10%	lambat
Selogiri	Kaliancar	KK-U	26,056	6 desa	29,663	6 desa	41,86	8 desa	30,447	8 desa	1.38%	sedang	4.11%	tinggi	-2.73%	lambat
Kecamatan-Kecamatan dengan Kawasan Perkotaan Kecil Berpenduduk <10,000 jiwa																
Wuryantoro	Wuryantoro	KK-B	3,278	1 desa	3,358	2 desa	4,004	1 desa	3,328	1 desa	0.24%	lambat	1.92%	sedang	-1.69%	lambat
Manyanan	Gunungan	KK-B	-	-	-	-	8,066	1 desa	6,343	1 desa	0.00%	-	0.00%	-	-2.14%	lambat
Ngadirojo	Ngadirojokidul	KK-B	-	-	-	-	9,144	1 desa	8,976	1 desa	0.00%	-	0.00%	-	-0.18%	lambat
Nguntoronadi	Nguntoronadi	KK-B	2,849	1 desa	3,085	1 desa	3,061	1 desa	2,378	1 desa	0.83%	lambat	-0.08%	lambat	-2.23%	lambat
Kawasan Utara-Tengah																
Kecamatan-Kecamatan dengan Kawasan Perkotaan Kecil Berpenduduk 20,000-50,000 jiwa																
Jatisrono	Gunungsari	KK-U	13,102	3 desa	14,637	3 desa	28,587	6 desa	23,622	6 desa	1.17%	sedang	9.53%	tinggi	-1.74%	lambat
	Pelem	KK-B	-	-	-	-	2,44	1 desa	1,957	1 desa	0.00%	-	0.00%	-	-1.98%	lambat
Kecamatan-Kecamatan dengan Kawasan Perkotaan Kecil Berpenduduk 10,000-20,000 jiwa																
Sidoarjo	Sidoarjo	KK-A	4,386	1 desa	4,918	1 desa	17,347	4 desa	16,13	4 desa	1.21%	sedang	25.27%	tinggi	-0.70%	lambat
Kecamatan-Kecamatan dengan Kawasan Perkotaan Kecil Berpenduduk <10,000 jiwa																
Jatipurno	Jatipurno	KK-B	2,702	1 desa	2,964	1 desa	3,486	1 desa	2,724	1 desa	0.97%	lambat	1.76%	sedang	-2.19%	lambat
Girimarto	Jendi	KK-B	3,414	1 desa	3,748	1 desa	3,283	2 desa	2,882	2 desa	0.98%	lambat	-1.24%	lambat	-1.22%	lambat

Kecamatan	Kawasan Perkotaan Kecil	1990		2000		2010		2019		Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Per Tahun					
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	1990-2000	2000-2010	2010-2019			
Kawasan Utara-Timur															
Kecamatan-Kecamatan dengan Kawasan Perkotaan Kecil Berpenduduk 10,000-20,000 jiwa															
Purwanto	Purwanto	-	-	-	-	17,045	4 desa	14,378	4 desa	0.00%	-	0.00%	-	-1.56%	lambat
Kecamatan-Kecamatan dengan Kawasan Perkotaan Kecil Berpenduduk <10,000 jiwa															
Slogohimo	Slogohimo	6,453	2 desa	7,066	2 desa	7,781	2 desa	7,557	2 desa	0.95%	lambat	1.01%	lambat	-0.29%	lambat
Kawasan Selatan-Timur															
Kecamatan-Kecamatan dengan Kawasan Perkotaan Kecil Berpenduduk <10,000 jiwa															
Baturetno	Baturetno	9,514	1 desa	8,931	1 desa	4,876	2 desa	4,044	2 desa	-0.61%	lambat	-4.54%	lambat	-1.71%	lambat
Tirtomoyo	Tirtomoyo	5,478	1 desa	5,923	1 desa	6,502	1 desa	4,917	1 desa	0.81%	lambat	0.98%	lambat	-2.44%	lambat
Kawasan Selatan-Barat															
Kecamatan-Kecamatan dengan Kawasan Perkotaan Kecil Berpenduduk <10,000 jiwa															
Pracimantoro	Pracimantoro	-	-	-	-	8,437	1 desa	7,696	1 desa	0.00%	-	0.00%	-	-0.88%	lambat

Sama halnya dengan perkembangan desa perkotaan, kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri juga mengalami penambahan jumlah dalam kurun waktu 2000-2010. Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 menunjukkan bahwa sejak awal perkembangannya, kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri didominasi oleh Kota Kecamatan Tipe B (KK-B) dengan ukuran penduduk kurang dari 10.000 jiwa. Kota Kecamatan Tipe B juga merupakan kawasan perkotaan kecil dengan penambahan jumlah paling banyak, yaitu sebanyak 3 kawasan perkotaan. Sementara itu, Kota Kecamatan Utama (KK-U) dan Kota Kecamatan Tipe A (KK-A) hanya bertambah sebanyak 1 kawasan perkotaan selama kurun 1990-2019.

Tabel 3. Jumlah Kawasan Perkotaan Kecil di Kabupaten Wonogiri Tahun 1990-2019

Jenis Kawasan Perkotaan Kecil	Jumlah Penduduk	Jumlah Kawasan Perkotaan			
		1990	2000	2010	2019
Kota Kecamatan Utama (KK-U)	20.000-50.000 jiwa	2	2	3	3
Kota Kecil Kecamatan Tipe A (KK-A)	10.000-20.000 jiwa	1	1	2	2
Kota Kecil Kecamatan Tipe B (KK-B)	<10.000 jiwa	8	8	11	11
Total		11	11	16	16

Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6 menunjukkan bahwa kawasan-kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri banyak tumbuh dan berkembang terutama di sepanjang dan/ atau sekitar jalan kolektor Solo-Ponorogo. Dilihat dari perkembangannya selama kurun waktu 1990-2019 KP Giripurwo dan KP Kaliancar merupakan dua kawasan perkotaan yang lebih dulu berkembang dibandingkan kawasan perkotaan lainnya. Kedua kawasan perkotaan yang merupakan Kota Kecamatan Utama (KK-U) tersebut berlokasi bersebelahan dan terletak di bagian barat laut (utara-barat) dari Kabupaten Wonogiri dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo. Sementara itu, pada tahun 2010 KP Gunung Sari di Kecamatan Jatisrono juga mulai terklasifikasi sebagai Kota Kecamatan Utama (KK-U) dengan penduduk 20.000-50.000 jiwa. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sampai tahun 2019 Kota Kecamatan Utama (KK-U) di Kabupaten Wonogiri hanya berada di bagian utara wilayah Kabupaten.

Kawasan perkotaan kecil yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi dan sedang hanya berada di sepanjang jalan kolektor primer dan berada di bagian utara Kabupaten Wonogiri. Lebih tingginya pertumbuhan penduduk di bagian utara terutama pada KP Jatisrono dan Purwantoro (KK-A) tersebut dikarenakan sejak awal perkembangannya terdapat 4 kawedanan (wilayah administrasi pemerintahan di bawah kabupaten dan di atas kecamatan) di kawasan bagian utara, yaitu berupa kawedanan Wonogiri, Wuryantoro, Jatisrono dan Purwantoro. Sementara itu, hanya terdapat 1 kawedanan di bagian selatan, yaitu kawedanan Baturetno. Tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan di bagian utara juga didorong oleh ketersediaan fasilitas di setiap kecamatan yang dulunya merupakan pusat kawedanan sehingga memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan banyak dibanding kecamatan lain. Fasilitas-fasilitas tersebut terutama berupa fasilitas perdagangan dan jasa dan keuangan seperti pasar, minimarket, supermarket, hotel, dan bank, serta koperasi.

Lebih lanjut, sebaran kawasan perkotaan kecil yang diidentifikasi melalui aglomerasi desa perkotaan, kedekatan lokasi, dan batas administrasi kecamatan. Tabel 2 dan Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6 menunjukkan jumlah dan lokasi yang berbeda dengan kawasan perkotaan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040. Menurut RTRW Kabupaten Wonogiri, kawasan perkotaan di Wonogiri terdiri atas kawasan perkotaan yang tersebar di enam kecamatan. Kawasan perkotaan tersebut berupa PPL (Pusat Pelayanan Lokal) di Kawasan Perkotaan Wonogiri (Kecamatan Wonogiri) dan PPK di perkotaan Kecamatan Pracimantoro, Baturetno, Purwantoro, Jatisrono, dan Wuryantoro. Sementara, menurut hasil identifikasi dalam penelitian ini kawasan perkotaan kecil juga telah tumbuh dan berkembang di tujuh kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manyaran, Nguntoronadi, Sidoharjo, Jatipurno, Girimarto, Slogohimo, dan Tirtomoyo. Ketujuh kecamatan lain tersebut berbatasan langsung dan atau di antara kecamatan dengan perkotaan yang telah ditetapkan dalam sistem perkotaan RTRW Kabupaten Wonogiri.

4.2 POTENSI AKTIVITAS KAWASAN PERKOTAAN KECIL DAN KAWASAN PERDESAAN DI SEKITARNYA

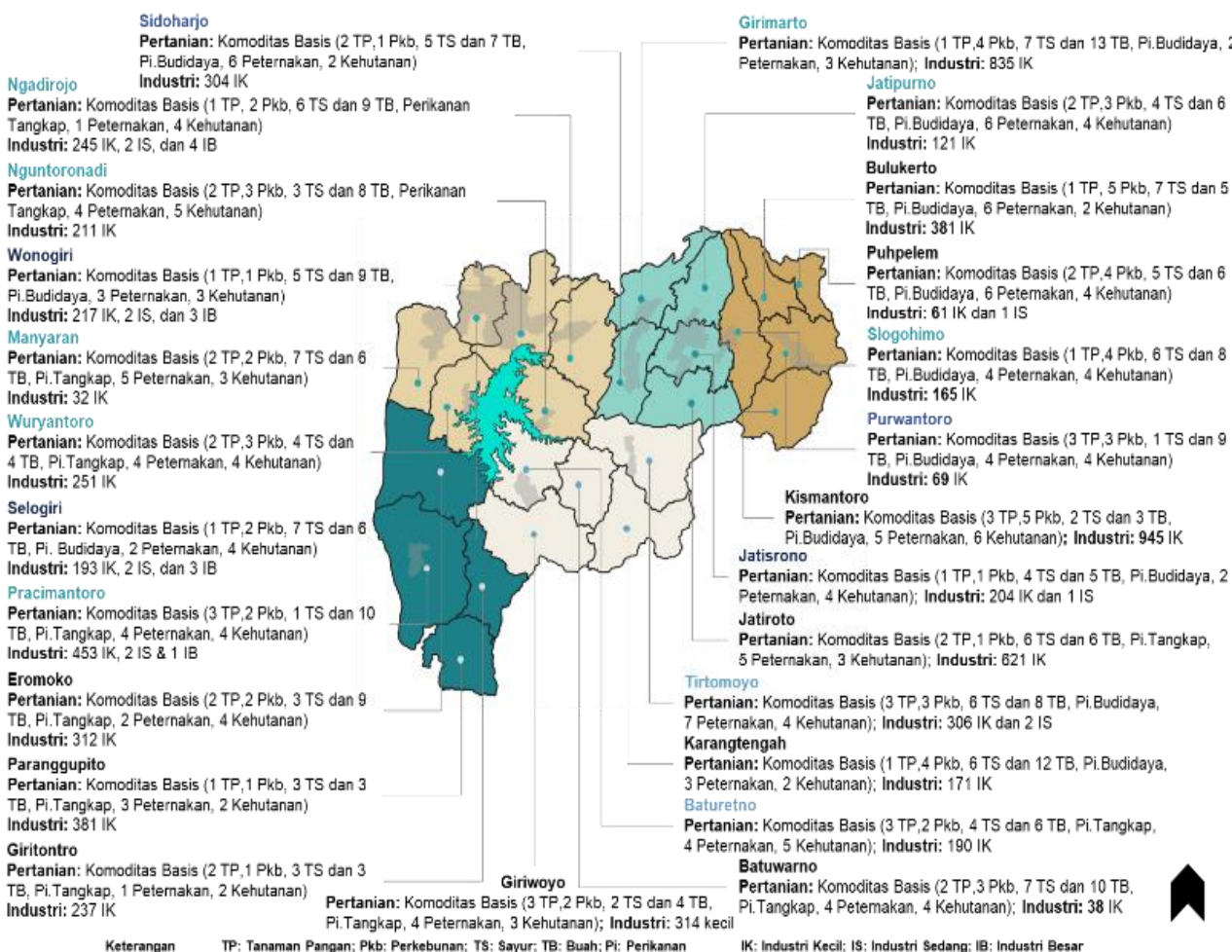
Identifikasi potensi aktivitas kawasan perkotaan kecil dan kawasan perdesaan di sekitarnya dilakukan dengan menggunakan data kecamatan yang dianggap merepresentasikan potensi aktivitas kota kecamatan dan kawasan perdesaan di kecamatan bersangkutan. Berdasarkan keberadaan kawasan perkotaan kecil dan tingkat urbanisasinya, kecamatan di Kabupaten Wonogiri dapat dikelompokkan menjadi empat jenis sebagaimana terlampir dalam Tabel 5. Dalam penelitian ini, potensi aktivitas kawasan perkotaan kecil dan kawasan perdesaan di sekitarnya dilakukan dengan memperhatikan potensi pertanian, industri, wisata, dan pertambangan yang dimiliki oleh setiap kecamatan. Identifikasi potensi aktivitas juga dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu pertanian, seperti jumlah produksi komoditas, luas lahan, serta fasilitas pertanian dan penunjangnya (Fauzi, 2018; Kusuma & Ma'rif, 2015; Padmini *et al.*, 2016; Wijayanti & Ma'rif, 2017), industri, seperti jumlah industri serta fasilitas penunjangnya, yaitu lembaga keuangan dan permodalan

dan sarana pemasaran (Cahyanti & Anjaningrum, 2018; Kusuma & Ma'rif, 2015); pariwisata, seperti keberadaan obyek wisata dan jumlah fasilitas penunjangnya yaitu sarana perdagangan dan jasa dan transportasi (Humagi *et al.*, 2021; Jordan & Wright, 2023; Lo *et al.*, 2019; Lysgård, 2019; Ma *et al.* 2021; Potter *et al.*, 2024) dan pertambangan dan energi melalui lokasi sebaran potensi sumber daya mineral (Ansori & Hastria, 2012).

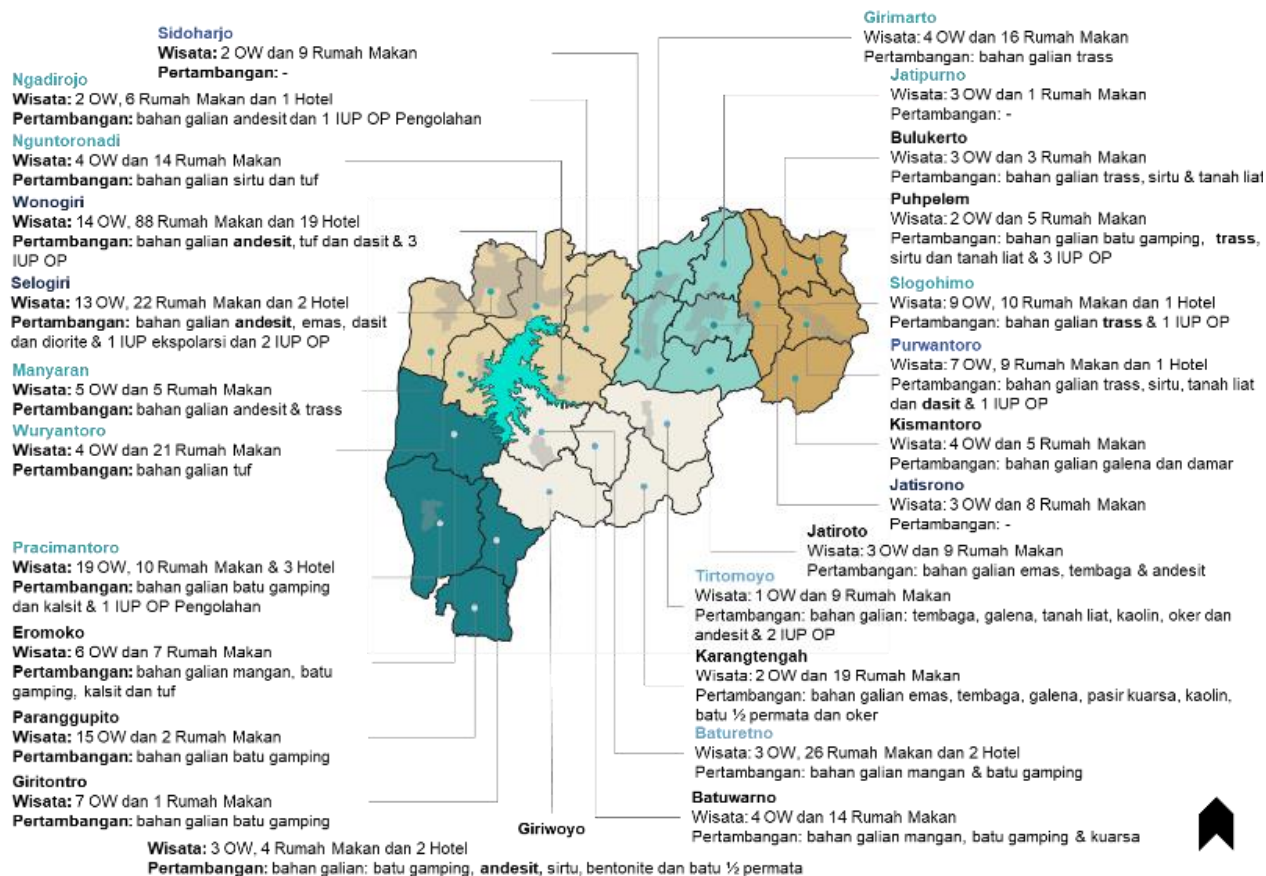
Tabel 4. Jenis Kecamatan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Keberadaan Kawasan Perkotaan Kecil dan Tingkat Urbanisasi Tahun 2019

Jenis Kecamatan	Kecamatan-kecamatan
Kecamatan dengan kota kecamatan utama	Kecamatan Selogiri, Wonogiri dan Jatisono
Kecamatan dengan kota kecil kecamatan tipe A	Kecamatan Sidoharjo dan Purwanto
Kecamatan dengan kota kecil kecamatan tipe B	Kecamatan Ngadirojo, Pracimantoro, Slogohimo, Manyaran, Tirtomoyo, Baturetno, Wuryantoro, Girimarto, Nguntoronadi dan Jatipurno
Kecamatan belum terurbanisasi	Kecamatan Jatiroto, Bulukerto, Puhpelem, Giriwoyo, Batuwarno, Karangtengah, Eromoko, Giritontro dan Paranggupito

Gambar 7 dan Gambar 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri, baik kecamatan dengan kawasan perkotaan kecil maupun kecamatan yang belum terurbanisasi memiliki potensi aktivitas pertanian, wisata dan industri. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan pertanian (hasil perhitungan LQ), obyek wisata, industri, dan fasilitas penunjang. Semua kecamatan kecuali 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Jatisono, Sidoharjo, dan Jatiroto juga memiliki potensi aktivitas pertambangan.



Gambar 7. Potensi Aktivitas Pertanian dan Industri Kawasan Perkotaan Kecil dan Kawasan Perdesaan Sekitarnya di Kabupaten Wonogiri Tahun 2019



Gambar 8. Potensi Aktivitas Wisata dan Pertambangan Kawasan Perkotaan Kecil dan Kawasan Perdesaan Sekitarnya di Kabupaten Wonogiri Tahun 2019

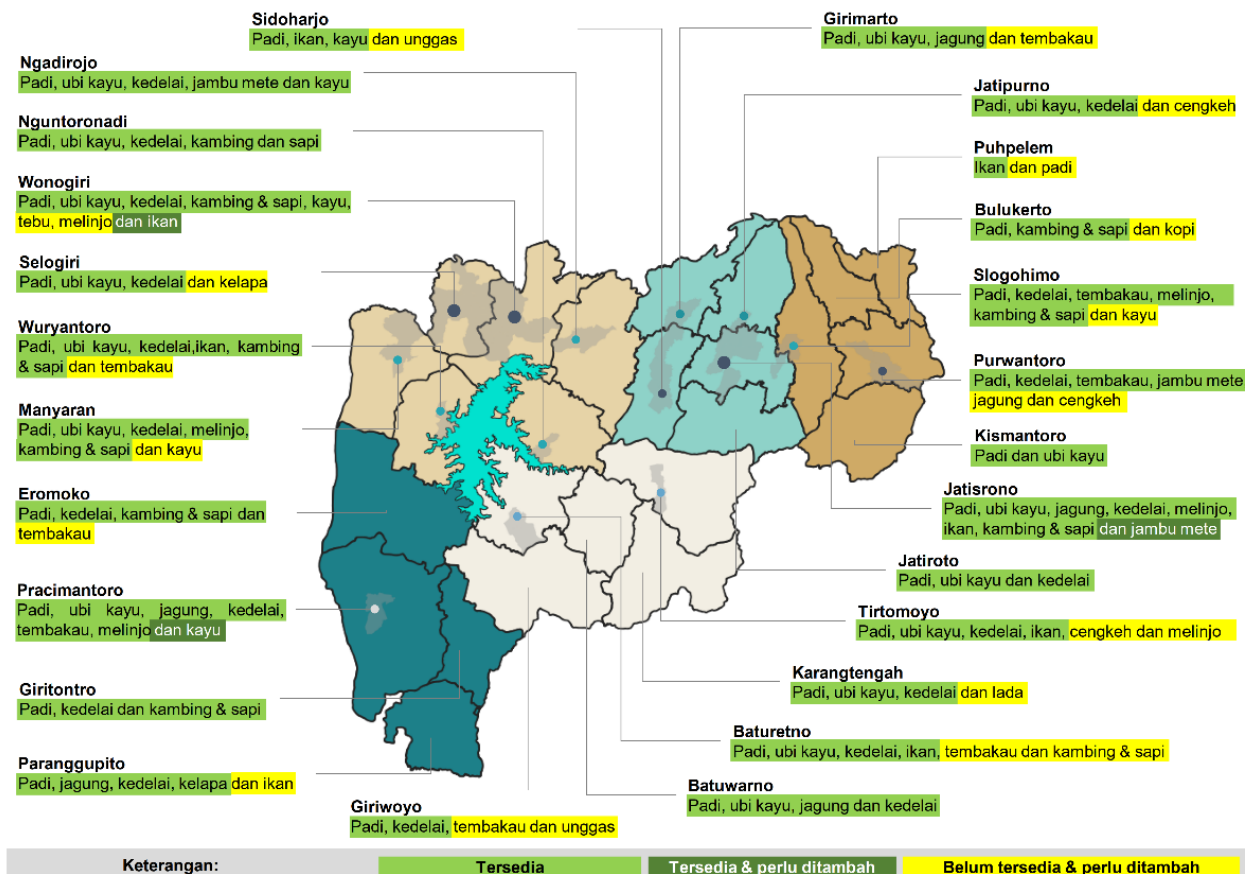
4.3 POTENSI PENINGKATAN PERAN KAWASAN PERKOTAAN KECIL DALAM KETERKAITAN DESA-KOTA

Keterkaitan desa-kota adalah arus atau aliran spasial individu, sumber daya alam, keuangan, barang jasa, serta nilai-nilai sosial dan budaya antara kawasan perdesaan dan perkotaan (Somanje *et al.*, 2020). Kawasan perkotaan kecil memiliki peran penting dalam keterkaitan desa-kota salah satunya, yaitu sebagai lokasi yang menyediakan pelayanan untuk peningkatan produk kawasan perdesaan dengan adanya fasilitas pengolahan, pemasaran/transit, dan pelayanan umum. Berdasarkan analisis potensi aktivitas kawasan perkotaan kecil dan kawasan perdesaan di sekitarnya dapat diketahui bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri memiliki potensi aktivitas yang beragam baik berupa pertanian, industri, wisata, maupun pertambangan. Secara keseluruhan berdasarkan analisis jangkauan pelayanan fasilitas penunjang, kawasan-kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri dalam hal ini sudah memiliki peran dalam menyediakan fasilitas pengolahan, pemasaran/transit dan pelayanan bagi kawasan perdesaan di sekitarnya.

Di masa depan, peran kawasan-kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri dapat diperkuat untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota dengan menyediakan dan/atau menambahkan jumlah fasilitas pengolahan, pemasaran/transit, serta pelayanan umum, termasuk fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan transformasi pada aktivitas ekonomi produksi dari pola tradisional menjadi pola yang lebih modern. Penambahan fasilitas untuk peningkatan peran kawasan perkotaan kecil juga diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan jumlah dan kelengkapan fasilitas antar kecamatan. Selain itu, juga dalam upaya mendukung kebijakan pengembangan kabupaten yang telah diatur dalam RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040, yaitu seperti rencana pengembangan kawasan industri besar dan sedang di kecamatan yang berada di bagian selatan kabupaten dan pemaksimalan keberadaan jalur lingkaran selatan (Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, dan Giriwoyo) untuk mendukung aktivitas kecamatan di sekitarnya.

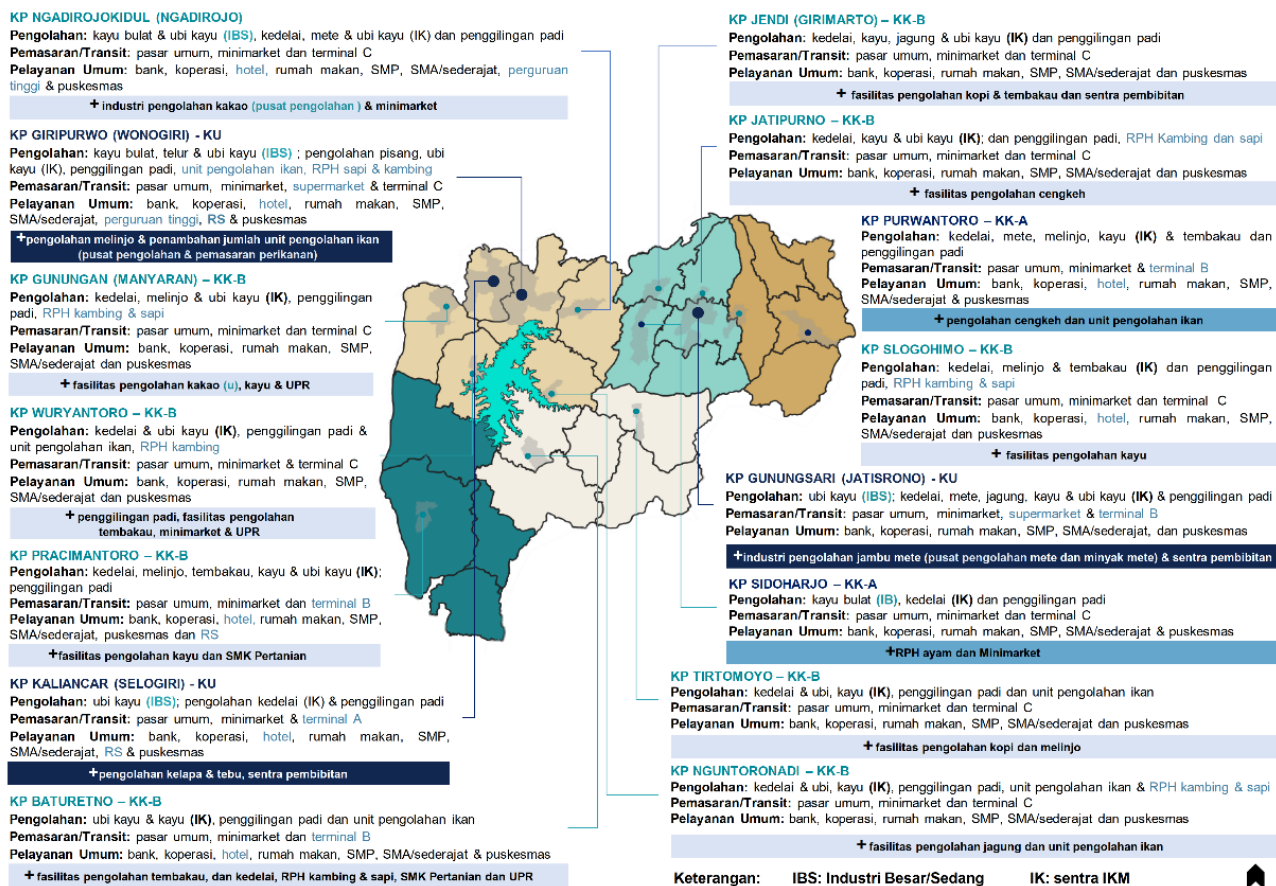
Secara keseluruhan, sebagian besar kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri dapat meningkatkan perannya sebagai lokasi yang menyediakan fasilitas pengolahan. Hal ini dikarenakan fasilitas pengolahan yang tersedia saat ini masih terbatas pada pengolahan komoditas tertentu dan belum mampu mengolah sebagian besar komoditas unggulan yang dimiliki. Penambahan dan/atau penyediaan fasilitas pengolahan ini juga perlu mempertimbangkan ketersediaan

fasilitas pengolahan yang sudah ada serta keberadaan sumber bahan baku (komoditas). Adapun kota kecamatan utama (KK-U) dan kota kecamatan tipe A (KK-A) yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dengan ketersediaan fasilitas yang lebih lengkap dalam hal ini berpotensi untuk menjadi pusat pengolahan beberapa komoditas tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka sebaran ketersediaan dan penambahan fasilitas pengolahan yang dapat dilakukan di masing-masing kawasan perkotaan kecil dan kecamatan belum terurbanisasi di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.



Gambar 9. Sebaran Ketersediaan dan Penambahan Fasilitas Pengolahan (Komoditas) pada Kawasan Perkotaan Kecil dan Kecamatan Belum Terurbanisasi

Kabupaten Wonogiri yang memiliki potensi unggulan pada aktivitas pertanian belum didukung oleh keberadaan fasilitas utama, seperti sentra pembibitan dan rumah pemotongan hewan yang merata terutama pada kecamatan yang belum terurbanisasi. Fasilitas pendidikan yang fokus dalam memberikan pengetahuan dan pelatihan untuk bidang pertanian juga belum tersedia. Dengan demikian, maka selain fasilitas pengolahan juga diperlukan adanya penyediaan fasilitas utama pertanian dan fasilitas pendidikan. Adapun fasilitas pendidikan berupa SMK pertanian dalam hal ini dapat dibangun (ditambahkan) pada kawasan perkotaan kecil yang berada di bagian selatan kabupaten dengan pertimbangan bahwa potensi pertanian bagian selatan lebih beragam dan didukung oleh akses jalur lingkar selatan. Selain itu, juga diperlukan penambahan fasilitas pemasaran di beberapa kawasan perkotaan kecil serta kecamatan belum terurbanisasi dikarenakan fasilitas yang ada saat ini masih belum merata. Secara lebih rinci, penyediaan/penambahan fasilitas dalam upaya peningkatan peran kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Potensi Peningkatan Peran Kawasan Perkotaan Kecil di Kabupaten Wonogiri dalam Penguatan Keterkaitan Desa-Kota

5. KESIMPULAN

Terlepas dari tingkat urbanisasinya yang rendah, Kabupaten Wonogiri mengalami penambahan kawasan perkotaan yang terdiri atas 11 Kota Kecamatan Tipe B (KK-B) dan 2 Kota Kecamatan Tipe A (KK-A). Penelitian ini menemukan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri memiliki potensi aktivitas beragam baik berupa pertanian, industri, wisata maupun pertambangan, yang berarti KP di Kabupaten Wonogiri memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas pengolahan, pemasaran/transit, dan pelayanan umum. Kawasan perkotaan kecil dengan ketersediaan fasilitasnya berperan penting sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian daerah. Keberadaan fasilitas pengolahan pada kawasan perkotaan kecil tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai peningkatan nilai tambah serta penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan adanya pasar yang cukup bagi produk-produk yang dihasilkan oleh kawasan perdesaan. Sedangkan keberadaan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan jenis aktivitas ekonomi perdesaan di sekitarnya akan memastikan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas perdesaan di sekitarnya. Dengan demikian, upaya peningkatan peran kawasan perkotaan kecil untuk memperkuat keterkaitan desa-kota di Kabupaten Wonogiri memerlukan adanya penambahan fasilitas pengolahan, pemasaran dan pendidikan di beberapa kawasan perkotaan kecil yang ada. Melalui penambahan dan pengembangan fasilitas-fasilitas tersebut, terutama Kota-Kota Kecamatan Utama (KK-U) dan KK-A dapat berperan dan lebih berpotensi sebagai pusat pertumbuhan serta pusat pelayanan bagi aktivitas ekonomi perdesaan yang terdapat di sekitar kawasan-kawasan perkotaan kecil tersebut serta di kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya. Penambahan dan pengembangan fasilitas di kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Wonogiri tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan jangkauan pelayanan fasilitas yang sudah ada beserta sebaran potensi aktivitas kawasan perdesaan di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2010). Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia: Buku 2 Jawa. *Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, p. 13. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

- Bole, D. (2022). (Re)discovering the Small and Medium-Sized Industrial Town and its Development Potential. In *A Research Agenda for Small and Medium-Sized Towns* (pp. 89–106). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800887121.00011>
- Cahyanti, M., & Anjaningrum, W. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 11(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.50>
- Davies, J., Hannah, C., Guido, Z., Zimmer, A., McCann, L., Battersby, J., & Evans, T. (2021). Barriers to Urban Agriculture in Sub-Saharan Africa. *Food Policy*, 103, 101999. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101999>
- Fahmi, F. Z., Hudalah, D., Rahayu, P., & Woltjer, J. (2014). Extended urbanization in small and medium-sized cities: The case of Cirebon, Indonesia. *Habitat International*, 42(April 2014), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.10.003>
- Fauzi, N. F. (2018). Potensi dan Strategi Pengembangan Pertanian pada Kelompok Tani Sumber Klopo I. *Jurnal Agribest*, 02(02), 159–173. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32528/agribest.v2i2.1627>
- Filipović, M., Kokotović, K. V., & Drobnjaković, M. (2016). Small Towns in Serbia – The “Bridge” Between the Urban and the Rural. *European Countryside*, 8(4), 462–480. <https://doi.org/doi:10.1515/euco-2016-0031>
- Firman, T. (2017). The Urbanisation of Java, 2000–2010: Towards the Island of Mega-Urban Regions. *Asian Population Studies*, 13(1), 50–66. <https://doi.org/10.1080/17441730.2016.1247587>
- Humagi, F., Moniaga, I. L., & Prijadi, R. (2021). Analisis Kebutuhan Prasarana dan Sarana Pariwisata di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Spasial*, 8(2), 190–20. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/33566>
- Jordan, D., & Wright, A. (2023). Starting the Conversation for a Town Centre Management Framework for Small Towns in Rural Places: An Irish Context. *Journal of Rural Studies*, 97, 395–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.12.011>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Konecka-Szydłowska, B. (2016). Significance of Small Towns in the Process of Urbanisation of the Wielkopolska Region (Poland). *European Countryside*, 8(4), 444–461. <https://doi.org/doi:10.1515/euco-2016-0030>
- Kusuma, A. M., & Ma'Rif, S. (2015). Keterkaitan Antar Desa melalui Aktivitas Agribisnis dan Industri Perdesaan di Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), 440–455. <https://doi.org/10.14710/tpwk.2015.9806>
- Liang, W., & Yang, M. (2019). Urbanization, Economic Growth and Environmental Pollution: Evidence from China. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 21, 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.suscom.2018.11.007>
- Lo, M.-C., Chin, C.-H., & Law, F.-Y. (2019). Tourists' Perspectives on Hard and Soft Services Toward Rural Tourism Destination Competitiveness: Community Support as a Moderator. *Tourism and Hospitality Research*, 19(2), 139–157. <https://doi.org/10.1177/1467358417715677>
- Lysgård, H. K. (2019). The Assemblage of Culture-led Policies in Small Towns and Rural Communities. *Geoforum*, 101, 10–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.02.019>
- Ma, C., Jiang, Y., & Qi, K. (2021). Investigating the Urban–Rural Integrated Town Development Strategy on the Basis of the Study of Rural forms in Nantong, China. *Frontiers of Architectural Research*, 10(1), 190–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foar.2020.06.001>
- Mardiansjah, F. H. (2020). Extended Urbanization in Smaller-sized Cities and Small Town Development in Java: The Case of the Tegal Region. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447(1), 12030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012030>
- Mardiansjah, Fadjar Hari, Handayani, W., & Setyono, J. S. (2018). Pertumbuhan Penduduk Perkotaan dan Perkembangan Pola Distribusinya pada Kawasan Metropolitan Surakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(3), 215. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.3.215-233>
- Mardiansjah, F. H & Rahayu, P. (2020). Perkembangan Kawasan Perkotaan Kecil di Pinggiran Kota Pekalongan. *Jurnal Geografi, GEA*, 20(2), 151–168.
- Mardiansjah, Fadjar Hari, Rahayu, P., & Rukmana, D. (2021). New Patterns of Urbanization in Indonesia: Emergence of Non-statutory Towns and New Extended Urban Regions. *Environment and Urbanization Asia* 12(1), 11–26
- Mayer, H., & Lazzeroni, M. (2022). *A Research Agenda for Small and Medium-Sized Towns*. Nottingham: Edward Elgar Publishing.
- Muhyiddin, N. T. & Miskiyah, N. (2017). Rural Urban Linkages, Fair Trade and Poverty in Rural Urban Fringe. *European Research Studies Journal*, XX (2A), 264-280. <https://doi.org/10.35808/ersj/641>
- Najarsadeghi, M., & Dorostkar, E. (2022). An Assessment of the Role of Small Towns in the Development of Periphery Population Centers Using Network Analysis. *Cities*, 131, 104026. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104026>
- Padmini, N. L. R., Wuisang, C. E. V, & Supardjo, S. (2016). Kawasan Agropolitan Modayag di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Spasial*, 3(3), 236–245. <https://doi.org/10.35793/sp.v3i3.14257>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Potter, E., Johanson, K., & D'Arcy, M. (2024). Activating Rural Infrastructures in Regional Communities: Cultural Funding, Silo Art Works and the Challenge of Local Benefit. *Journal of Rural Studies*, 106. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103239>
- Rossetti, G., & Quinn, B. (2021). Understanding the Cultural Potential of Rural Festivals: A Conceptual Framework of Cultural Capital Development. *Journal of Rural Studies*, 86, 46–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.009>

- Sakketa, T. G. (2023). Urbanisation and Rural Development in sub-Saharan Africa: A Review of Pathways and Impacts. *Research in Globalization*, 6, 100133. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100133>
- Setyono, J. S., Yunus, H. S., & Giyarsih, S. R. (2017). Pengelolaan Kota-Kota Kecil di Jawa Tengah: Studi Kasus pada Empat Kota Kecil di Wilayah Joglosemar. *Tataloka*, 19(2), 142. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.142-162>
- Soetomo, S. (2018). *Urbanisasi & Morfologi : Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruangnya Menuju Ruang yang Manusiawi* (3rd ed.). Yogyakarta: Mobius.
- Somanje, A. N., Mohan, G., Lopes, J., Mensah, A., Gordon, C., Zhou, X., ... Takeuchi, K. (2020). Challenges and Potential Solutions for Sustainable Urban-Rural Linkages in a Ghanaian Context. *Sustainability*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/su12020507>
- UN Department of Economic and Social Affairs, P. D. (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. In *Demographic Research* (Vol. 12). New York: United Nations. Retrieved from <https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf>
- Wang, M., Yuan, M., Han, P., & Wang, D. (2022). Assessing Sustainable Urban Development Based on Functional Spatial Differentiation of Urban Agriculture in Wuhan, China. *Land Use Policy*, 115, 105999. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.105999>
- Wang, X., Liu, S., Sykes, O., & Wang, C. (2019). Characteristic Development Model: A Transformation for the Sustainable Development of Small Towns in China. *Sustainability*, 11(13). <https://doi.org/10.3390/su11133753>
- Wijayanti, M., & Ma'rif, S. (2017). Peran Kota-Kota Kecil Dalam Peningkatan Aktivitas Pertanian di Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 6(3), 180–190. Retrieved from <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk>
- Yu, Z., Yuan, D., Zhao, P., Lyu, D., & Zhao, Z. (2023). The Role of Small Towns in Rural Villagers' Use of Public Services in China: Evidence from a National-Level Survey. *Journal of Rural Studies*, 100, 103011. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103011>